

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 November 2024
Waktu	: 14.40 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: 1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024; 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 (per Oktober); 3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA 2025; dan 4. Isu-isu aktual
Ketua Rapat	: Siti Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/FPGerindra) dilanjutkan oleh Ahmad Yohan, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PAN)
Sekretaris Rapat	: Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 34 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Raja Juli Antoni, MA., Ph.D. (Menteri Kehutanan); 2. dr. H. Sulaiman Umar Siddiq (Wakil Menteri Kehutanan); 3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Sekretaris Jenderal); 4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP., CGCAE., QIA., CEIO (Inspektur Jenderal); 5. Prof. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber. Daya Alam dan Ekosistem) 6. Dr. Ir. Mahfudz, M.P. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan); 7. Ir. Dida Mighfar Ridha, M.Si. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari); 8. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);

9. Drs. Ade Paiguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
10. Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan);
11. Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., MBA. (Plh. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK); dan
12. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan dan dihadiri oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 (per Oktober), Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA 2025, dan Isu-isu aktual, dibuka pukul 14.40 WIB oleh Ketua Rapat, Siti Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/FPGerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2023 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK RI tahun 2023 melalui peningkatan tata kelola keuangan, mengevaluasi program yang masih memiliki kelemahan, serta memperkuat koordinasi dengan BPK RI untuk mencegah temuan berulang.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kehutanan terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 dan mendorong percepatan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK RI.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan capaian penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebesar 73,56% atau senilai Rp6.227.362.317.441,00 (enam triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp8.645.669.708.000,00 (delapan triliun enam ratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong

Kementerian Kehutanan agar meningkatkan capaian tersebut sampai dengan akhir tahun 2024.

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan rencana anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2025 sebesar Rp5.158.508.538.000,00 (lima triliun seratus lima puluh delapan miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk tetap berkomitmen tidak akan merealokasi anggaran berbasis masyarakat agar pencapaian target program dan kegiatan di tahun 2025 efektif dan tepat sasaran.
5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas usulan penambahan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2025 sebesar Rp3.067.147.889.000,00 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan segera mengajukan proses penambahan anggaran tahun 2025 dimaksud agar rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.
6. Komisi IV DPR RI mendukung penuh program Kementerian Kehutanan terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk memperluas program berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti hutan sosial, agroforestri, dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan kayu dan non kayu.
7. Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Kehutanan dalam menyelesaikan kasus perkebunan kelapa sawit dan tambang ilegal di dalam kawasan hutan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Kasus Sawit dan Tambang Ilegal yang terdiri dari Kementerian Kehutanan dan bekerja sama dengan Penegak Hukum (Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Kementerian Keuangan.

8. Komisi IV DPR RI merekomendasikan dilakukannya perpanjangan masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Menteri Kehutanan,

Ttd.

Raja Juli Antoni, MA., Ph.D.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Ahmad Yohan, M.Si.
A-522